

MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN TV KUTIM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) KABUPATEN KUTAI TIMUR

RETNO PUSPITA ANGGRAINI¹

Abstrak

Retno Puspita Anggraini. NIM. 1302055196. Manajemen Media Penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur, di bawah bimbingan Hikmah, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing I, Nurliah, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing II, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana manajemen penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dan UPTD TV Kutim. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui proses observasi dan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari Milles&Huberman.

Hasil penelitian ini bahwa TV Kutim tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Penyiaran bahwa televisi Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Selain itu, manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dan TV Kutim tidak sesuai standar menurut fungsi manajemen organisasi klasik Henry Fayol. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan tidak ada pembaharuan visi misi lembaga penyiaran dan tidak netral karena lebih memprioritaskan untuk menyiarkan kegiatan pemerintah. Dalam pengorganisasian, TV Kutim dibawah pengelolaan dinas Kominfo memiliki permasalahan terkait pembagian kerja yang tidak sesuai dengan job description karyawan. Pada pelaksanaan manajemen, TV Kutim tidak mengimplementasikan visi misi yang telah ada secara maksimal. Pada tahap pengawasan, Dinas Kominfo dan TV Kutim tidak mengawasi manajemen dan program penyiaran sehingga menyiarkan film yang mengandung unsur pornografi. Dan pada tahap evaluasi, Dinas Kominfo dan TV Kutim selama ini melakukan evaluasi manajemen hanya saat terjadi permasalahan.

Kata Kunci: *Manajemen, Media, Televisi Publik Lokal*

¹ Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.
Email: retno.puspitaanggraini@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. Elvinaro dalam Buku Komunikasi Massa (2009:134) mengatakan dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Televisi mengalami perkembangan secara drastis, terutama saat gerakan reformasi pada tahun 1998 yang telah memicu perkembangan industri media massa. Menjelang tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV 7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi daerah. Tidak ketinggalan pula munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam dan luar negeri. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2000, jumlah televisi di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Keempat jenis stasiun penyiaran tersebut dengan fungsinya masing-masing menjadi bagian penting dalam sistem penyiaran di Indonesia.

Selain di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan stasiun publik lokal. Kalimantan timur sendiri memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu RRI Samarinda, TVRI Kaltim Balikpapan, RRI Tanah Grogot, RRI Stasiun Relay, TVRI Kaltim Berau, RRI Tanjung Redeb, RSPD Tanjung Redeb, Berau Televisi, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten PPU, Sendawar FM, Radio Pemerintah Daerah Kutim dan TV Pemkab Kutim. Hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran publik menjelaskan bahwa lembaga penyiaran publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Sebagaimana organisasi atau perusahaan lain, media penyiaran menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya dan setiap orang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumberdaya organisasi lainnya dengan menjalankan fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staff, kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Mengelola suatu media penyiaran memberikan tantangan yang tidak mudah kepada pengelolanya. Sebagaimana ditegaskan Peter Pringle (1991): *“Few Management position offers challenges equal to those of managing a commercial radio or television station (tidak banyak posisi manajemen yang memberikan tantangan setara dengan mengelola suatu stasiun radio dan televisi lokal)”*.

TV Kutim merupakan salah satu lembaga publik lokal yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berdiri sejak tahun 2003 dan diresmikan langsung oleh Bapak Awang Faroek Ishak yang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur pada saat itu. TV Kutim merupakan lembaga penyiaran yang berorientasi pada visi dan misi sebuah lembaga penyiaran lokal milik pemerintah yang tentunya intens terhadap lokalitas dalam arti menggali seluruh potensi kelokalitasan dan keanekaragaman potensi yang dimiliki daerah. Dari awal berdiri sampai sekarang TV Kutim tidak mengalami perubahan visi dan misi lembaga penyiaran. Pada tahun 2015 TV Kutim berhenti siaran selama setahun untuk membenahan fasilitas. TV Kutim aktif kembali pada pertengahan tahun 2016. Namun ternyata TV Kutim masih memiliki permasalahan karena sampai saat ini belum memiliki izin penyiaran dan hanya menggunakan Perbub (Peraturan Bupati). Selain permasalahan izin, TV Kutim juga mengalami permasalahan pada manajemennya terkait kegiatan perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan, pengawasan dan kegiatan evaluasi pada media penyiaran.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah maka masalah pada dasarnya merupakan sebuah sebab akibat dari suatu sebab yang dituntut untuk diselesaikan atau dengan kata lain masalah merupakan persoalan yang membutuhkan jawaban. Maka penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dan dibahas adalah bagaimana Manajemen Media Penyiaran TV Kutim sebagai Televisi Publik Lokal di Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen media penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat di kemudian hari baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Berikut manfaat yang dimiliki penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang manajemen penyiaran dan sebagai bahan masukan dalam pengembangan pengelolaan manajemen media massa televise dan kelak diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi penelitian komunikasi yang berkaitan dengan manajemen media penyiaran.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif dan masukan bagi para pembaca untuk menemukan isi yang disajikan sebagai bahan rujukan. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi TV Kutim dalam pengambilan kebijakan manajemen penyiaran untuk masa yang akan datang.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori Organisasi Klasik Henry Fayol

Henry Fayol (dalam buku Malayu, 2009: 8) berasal dari Prancis dan bekerja pada *Commantry Chambault Company* atau Perusahaan Tambang Batu Bara pada tahun 1916 menerbitkan buku berjudul *Administration Industrielle et General* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *General and Industrial Management* oleh *Constance Storrs*. Henry Fayol berhasil mengemukakan beberapa asas yang praktis dan sederhana yang dapat digunakan dalam menjelaskan pekerjaan seseorang manajer. Ia juga mengembangkan pandangan-pandangan tentang manajemen sebagai suatu hal yang terdiri dari fungsi-fungsi *planning, organizing, coordinating, commanding, dan controlling* (disingkat POC 3).

Teori Difusi Inovasi

Everett M. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana para pelakunya menciptakan informasi dan saling bertukar informasi tersebut untuk mencapai pengertian bersama. Di dalam pesan itu terdapat ketertarikan (*newness*) yang memberikan ciri khusus kepada difusi yang menyangkut ketidakpastian (*uncertainty*). Derajat ketidakpastian seseorang akan dapat dikurangi dengan jalan memperoleh informasi.

Unsur utama difusi adalah: (a) inovasi; (b) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu; (c) dalam jangka waktu tertentu; (d) di antara para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi: (a) *relative advantage* (keuntungan relatif); (b) *compatibility* (kesesuaian); (c) *complexity* (kerumitan); (d) *trialability* (kemungkinan dicoba); (e) *observability* (kemungkinan diamati). Everett M. Rogers dan Floyd G. Shoemaker mengemukakan bahwa teori difusi inovasi dalam prosesnya ada empat tahap, yaitu (a) pengetahuan; (b) persuasi; (c) keputusan; (d) konfirmasi.

Manajemen Media Penyiaran

Menurut Koonts dan O'Dannell (1980) (dalam buku Tommy, 2011: 129) manajemen diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu dengan menggunakan orang lain (*getting things done through people*). Manajemen berasal dari kata *manage* dan dalam bahasa Latin *manus*, yang berarti memimpin, mengatur, atau membimbing.

Penyiaran berasal dari kata *siar*, yakni pendistribusian informasi dengan menggunakan peralatan pemancar yang dipancarkan dari studio radio atau televisi yang menghasilkan suara (audio) dan gambar bergerak (visual) secara simultan dan sinkron untuk televisi dan audio untuk radio. Kegiatan untuk menyiarkan program yang dilakukan oleh radio dan televisi disebut siaran.

Kegiatan penyiaran termasuk dalam produk manajemen komunikasi karena merupakan kegiatan di dalam mengelola informasi yang dikemas dalam bentuk program acara siaran.

Manajemen penyiaran merupakan penerapan manajemen di stasiun radio dan televisi, yaitu perusahaan atau lembaga yang mengelola siaran. Hal ini berarti manajemen penyiaran menjadi motor penggerak organisasi penyiaran radio dan televisi untuk mencapai tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran. Pada dasarnya proses perencanaan, pelaksanaan produksi, pemancarluasan siaran, dan evaluasi siaran, merupakan proses transformasi kegiatan penyiaran yang ada di dalam manajemen penyiaran. Mengelola suatu media penyiaran memberikan tantangan yang tidak mudah kepada pengelolanya, sebagaimana ditegaskan Peter Pringle (1991) (dalam buku Morissan, 2011: 134) : *few challenges equal to those of managing a commercial radio or television* (tidak banyak posisi manajemen yang memberikan tantangan yang setara dengan mengelola suatu stasiun radio dan televisi lokal).

Pengelola siaran harus selalu berorientasi pada pasar, yaitu pendengar dan pemirsa. Pengelolaan siaran harus mengetahui selera pasar dengan secara periodik mengadakan penelitian selera khalayak atau *audience profil research*, dan menyesuaikan materi siaran sesuai selera khalayak. Selain itu, media penyiaran harus menghadapi persaingan yang berasal dari berbagai media penyiaran yang ada. Selain persaingan secara langsung dengan media penyiaran lainnya, stasiun radio dan televisi juga harus bersaing dengan jenis media massa lainnya seperti televisi kabel, internet, VCD, dan DVD.

Fungsi Manajemen Penyiaran

Pada media penyiaran, manajer umum (*general manager*) bertanggung jawab kepada pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan koordinasi sumber daya yang ada (manusia dan barang) sedemikian rupa sehingga tujuan media penyiaran bersangkutan dapat tercapai. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya, manajer umum melaksanakan empat fungsi dasar yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
5. Evaluasi

Televisi sebagai Media Penyiaran

Kegiatan penyiaran melalui media televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan Pesta Olahraga se-Asia IV atau Asean Games di Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun (*station call*) hingga sekarang. Selama tahun 1962-1963 TVRI berada diudara rata-rata satu jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran

televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2, selanjutnya satelit Palapa B, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1992. (Elvinaro, 2009: 136). Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Barulah pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada seluruh kelompok usaha bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, indosiar, ANTV, dan TPI.

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi daerah. Tidak ketinggalan pula munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam dan luar negeri. (Morissan, 2009: 10).

Televisi Publik Lokal

Di daerah-daerah ada begitu banyak televisi baru didirikan oleh unsur pemerintah daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ada yang kepemilikannya secara kelembagaan, ada pula yang bersifat pribadi. Televisi-televisi ini juga mengklaim diri sebagai televisi lokal. Semangat mereka juga semangat otonomi daerah, desentralisasi, dan pemberdayaan nilai-nilai lokal. Lahirnya televisi-televisi “pemda” kurang lebih berawal dari hasrat memanfaatkan momentum reformasi untuk mendirikan televisi baru. Mereka memanfaatkan kondisi tidak taat hukum pasca pembubaran departemen penerangan, serta ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih antara UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, dan UU Otonomi daerah. Sulit untuk mengidentifikasi apakah televisi “pemda” diproyeksikan sebagai televisi komunitas atau televisi swasta lokal. Kalangan pemerintah daerah bisa melihat adanya peluang bagi eksekutif untuk mendirikan stasiun televisi sendiri, yakni televisi publik daerah. Undang-undang No.32 Tahun 2002 menegaskan lembaga penyiaran publik dapat didirikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sehingga muncul istilah lembaga penyiaran publik lokal (pasal 14 ayat 3).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pembatas pengertian tentang suatu konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan teori dan konsep, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah peran TV Kutim sebagai media baru masyarakat Kutai Timur dan manajemen media penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur dengan menjalankan fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan evaluasi (*evaluating*).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan manajemen yang di gunakan dalam menyiarkan memajemen media penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur dengan menerapkan fungsi manajemen:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pelaksanaan (*actuating*)
4. Pengawasan (*controlling*)
5. Evaluasi (*evaluating*)

Sumber dan Jenis Data

1. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data melalui metode *purposive sampling*. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Key Informan adalah orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Bapak Dia Budi selaku Kepala UPTD TV Kutim.
 - b. Informan adalah orang yang dipercaya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Bapak Drs. H. Moch. Erlyan Noor, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
2. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara Mendalam
- c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Menurut Kriyantono (2006) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dilapangan. Data tersebut baik dari studi pustaka dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU.47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 km² (17%) dari wilayah Kalimantan Timur.

Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran tata batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran). Terdiri dari 18 kecamatan dengan 135 desa. Jumlah penduduk 168.529 jiwa dengan kepadatan 4,71 penduduk / km² dan pertumbuhan 1,85% tahun 2004 .

Batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Berau
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
3. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Di sebelah timur berbatasan dengan selat Makassar

Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur

Visi:

Terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa pada sektor agribisnis dan agroindustri
3. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata

4. Meningkatkan pengelolaan tata ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

UPTD TV KUTIM

TV Kutim mengawali eksisnya di dunia broadcasting melalui dialog langsung bersama bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak, Ketua DPRD Kutai Timur dan Sekda Pemkab Kutai Timur pada saat itu. Kemudian berlanjut dengan debut lomba presenter dan pematangan kru TV Kutim yang bekerjasama dengan televisi lokal bontang yaitu PKTV Bontang. Pada Tahun 2015 mengalami vakum selama setahun yang bertujuan untuk memperbarui fasilitas.

Awalnya TV Kutim hanya menggunakan sistem analog, namun kini sudah berubah menjadi sistem digital sehingga jangkauan siaran bisa dinikmati seluruh masyarakat kutai timur. “TV KUTIM, TV nya orang KUTIM” semangat ini menjadi motorik kru dan seluruh pemirsa serta masyarakat kutim dalam kelangsungan perjalanan program-program penyiaran.

Visi dan Misi UPTD TV KUTIM

Visi:

Menjadi media dan jembatan bagi pemerintah daerah dalam upaya perubahan dan percepatan pembangunan serta turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah regional Kutai Timur Sangatta.

Misi:

1. Memberikan program acara-acara yang bersifat informasi, mendidik, dan hiburan
2. Menyediakan informasi pelayanan pemerintah yang berimbang dan berkesinambungan
3. Menciptakan iklim kemandirian masyarakat yang mendukung upaya pembangunan GERDABANGAGRI
4. Mendorong inovasi dan kreatifitas dan daya saing dalam pengembangan minat dan bakat masyarakat Sangatta.
5. Memberikan alternatif solusi pengembangan media elektronik yang sangat *low cost* dan *cost* efektif untuk penyebarluasan teknologi informasi melalui siaran televisi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu cara bertindak yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang baik berasal dari visi dan misi organisasi. Dalam perencanaan, TV Kutim tidak melakukan perencanaan dengan baik. Visi dan misi lembaga penyiaran TV Kutim tidak mengalami perubahan dari awal berdiri sampai saat ini. Melihat pentingnya visi dan misi suatu lembaga penyiaran, seharusnya sebagai lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah, visi dan misi mengalami perubahan seiring dengan

perubahan visi dan misi kabupaten kutai timur. Visi dan Misi hanya tertera dalam website dan tidak diimplementasikan secara maksimal. Selain tidak mengalami perubahan, dinas Kominfo dan TV Kutim ternyata tidak memiliki data tertulis mengenai visi, misi dan tujuan lembaga penyiaran TV Kutim. Karena itu, sampai saat ini TV Kutim masih bersatus ilegal karena tidak memiliki izin penyiaran. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, maka TV Kutim harus membuat studi kelayakan yang memuat penjelasan yang salah satunya melampirkan data visi, misi dan tujuan pendirian lembaga penyiaran.

Dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pasal 4 yaitu pendirian LPP Lokal harus memenuhi persyaratan yang salah satunya yaitu LPP Lokal tersebut harus berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Namun sampai saat ini TV Kutim tidak mendapatkan peraturan daerah (perda) terkait lembaga penyiaran lokal dari DPRD Kutai Timur sehingga siarannya diberhentikan sementara oleh KPID Kalimantan Timur. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, maka TV Kutim harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini yang kemudian dikirimkan masing-masing kepada Menteri dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikut: (1) latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan; (2) susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran; (3) uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja; (4) uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran; (5) daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan, studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya); (6) gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya; (7) usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan; dan (8) spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan.

Perencanaan juga terkait dengan rencana strategis dan rencana operasional. Dalam melaksanakan rencana strategis terdapat penetapan kebijakan mengenai program yang akan disiarkan. Kebijakan TV Kutim yaitu lebih mendahulukan menyiarkan informasi yang harus segera ditayangkan ataupun terkait kegiatan pemerintahan. Seharusnya TV Kutim sebagai lembaga penyiaran publik lokal kabupaten kutai timur hendaknya menyiarkan informasi yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. TV Kutim tidak seharusnya digunakan untuk memberikan informasi citra positif pemerintah terhadap masyarakat.

Pengorganisasian

Pengorganisasian meliputi 2 kegiatan penting yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Dalam struktur organisasi, TV Kutim dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Timur. Untuk pelaksanaan program dan manajemen dikelola langsung oleh TV Kutim namun tetap di bawah pengawasan dan pembinaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam pengorganisasian, TV Kutim merupakan organisasi bentuk tunggal karena pucuk pimpinan berada di tangan satu orang yaitu Kepala UPTD. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaannya bersumber dan bermuara kepadanya. Demikian pula tanggung jawab dalam organisasi, melalui tingkat-tingkat pengawasan pada akhirnya sampai kepadanya, dimana Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penyiaran. TV Kutim tidak terbagi menjadi beberapa departemen, hanya terbagi dalam beberapa bagian saja yaitu kordinator liputan, editor, narator, kameramen, dan administrasi. Hal ini dikarenakan TV Kutim hanya stasiun kecil sehingga tidak ada pembagian dalam beberapa departemen.

Media penyiaran juga memiliki standar kelayakan sumber daya manusia yaitu, (1) lembaga penyiaran menggunakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, dan kualifikasi sesuai standar kelayakan profesi penyiaran; (2) untuk menduduki jabatan yang membutuhkan kemampuan teknis atau keahlian khusus harus memiliki sertifikasi dari organisasi profesi lembaga penyiaran, lembaga pendidikan/pelatihan, atau institusi terkait yang relevan; dan (3) jabatan di lembaga penyiaran yang harus memiliki sertifikasi adalah program *director*, *news director*, *music director*, produser, dan teknisi. Dalam pengorganisasian TV Kutim tidak memenuhi ketiga standar kelayakan sumber daya manusia tersebut

Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen pada TV Kutim tidak berjalan baik. Terlihat dari tidak adanya perubahan pada visi misi sejak awal berdiri sampai saat ini. Visi misi yang terdapat dalam website juga tidak diimplementasikan secara maksimal. TV Kutim maupun Dinas Kominfo tidak mengetahui visi misi yang mereka miliki sehingga tujuan dalam melaksanakan pekerjaan mereka hanya fokus untuk menyiarkan kegiatan pemerintah saja. Padahal dalam pelaksanaan visi misi, TV Kutim seharusnya dapat menyiarkan program pemerintah yang netral dan berimbang kepada masyarakat. Bukan hanya pemberitaan terkait dengan citra positif namun juga berimbang dalam menyiarkan permasalahan pemerintah yang terjadi. TV Kutim sebagai media pemerintah seharusnya juga turut serta menyiarkan program yang tidak hanya memberikan informasi tentang pemerintah, tapi juga lebih aktif dalam menyiarkan program terkait kegiatan ataupun informasi di seputar wilayah kutai timur. Program edukasi juga sebaiknya diperbanyak agar dapat menjadi media yang mencerdaskan masyarakat.

Pengawasan

Dalam lembaga penyiaran, pengawasan memegang peranan penting karena output siaran memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat. Kepala Dinas bertugas untuk mengawasi manajemen yang terkait pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, maupun program. Dalam mengawasi program, Kepala Dinas juga melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk ikut mengawasi program yang telah di siarkan oleh TV Kutim. Sedangkan tugas dari Kepala UPTD TV Kutim yaitu melakukan pengawasan terhadap program dan memastikan tidak ada kesalahan dalam program tersebut. Pengawasan dilakukan bukan hanya di akhir proses manajemen, namun pada hakikatnya pengawasan melekat dilakukan sejak fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan (Fajar, 2014: 46). Tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dinas Kominfo tidak mengawasi fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam stasiun penyiaran TV Kutim. Media tersebut melaksanakan perencanaan tanpa kehadiran dan keterlibatan pihak dinas Kominfo sehingga tidak mengetahui apa yang telah direncanakan dan program apa saja yang akan di tayangkan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sebuah perencanaan penyiaran. Evaluasi sejatinya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan. Ketika pengawasan telah dilakukan, maka akan di evaluasi apakah ada permasalahan untuk perbaikan di masa mendatang. Seperti halnya pengawasan, TV Kutim dan Dinas Kominfo tidak melakukan secara maksimal sehingga tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada TV Kutim. Sehingga pada saat TV Kutim menghadapi permasalahan tayangan yang mengandung unsur pornografi, dinas Kominfo dan jajaran dinas yang terkait baru mengadakan evaluasi untuk memperbarui manajemen. Hal ini sangat disayangkan, TV Kutim sudah di tunjang dengan fasilitas yang memadai seharusnya dibarengi dengan kualitas manajemen yang baik.

Terdapat 3 kreteria evaluasi yang digunakan oleh manajemen umumnya yang mencakup efektifitas, efisiensi dan responsivitas. Kegiatan yang dilakukan TV Kutim tidak efektif karena tidak terdapat tujuan jelas yang ingin dicapai oleh TV Kutim. Sumber daya yang digunakan terkait karyawan yang bekerja dalam media tersebut tidak bekerja secara efisien karena TV Kutim kekurangan karyawan sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. TV Kutim rutin mengadakan survey ke masyarakat untuk mengetahui respon terhadap program yang telah di tayangkan. TV Kutim hendaknya rutin mengadakan pengawasan dan evaluasi dari awal sampai akhir terkait manajemen maupun program agar masalah segera bisa diatasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat dilihat dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan yang dapat diberikan peneliti

tentang “Manajemen Media Penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur” adalah sebagai berikut :

1. TV Kutim dan Dinas Kominfo tidak melakukan kerjasama dalam menetapkan perencanaan lembaga penyiaran. Hal ini mengakibatkan sampai saat ini TV Kutim tidak memiliki data-data lembaga penyiaran sehingga belum mendapatkan izin penyiaran dari KPID Kaltim. Dalam merencanakan program, TV Kutim dan Dinas Kominfo sulit untuk memberikan berita yang berimbang karena merupakan media pemerintah yang tentunya harus memberikan citra positif ke masyarakat.
2. Pengorganisasian TV Kutim tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya departementalisasi dan pembagian kerja terhadap karyawan. Karyawan yang telah memiliki job description dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan kurangnya karyawan profesional yang bekerja pada media penyiaran TV Kutim.
3. Pelaksanaan manajemen tidak berjalan dengan baik karena visi misi lembaga penyiaran yang telah ada sejak dulu tidak diketahui oleh Dinas Kominfo maupun TV Kutim sehingga tidak diimplementasikan secara maksimal.
4. Dinas Kominfo dan TV Kutim terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap program maupun manajemennya. TV Kutim terbukti menyiarkan program yang memuat konten pornografi. Dinas Kominfo sebagai dinas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan juga tidak melakukannya secara maksimal sehingga terdapat banyak permasalahan dalam lembaga penyiaran tersebut.
5. Evaluasi yang dilakukan Dinas Kominfo dan TV Kutim hanya saat terjadi permasalahan saja.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti tentang “Manajemen Media Penyiaran TV Kutim sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kutai Timur” adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik dapat bekerjasama melegalkan TV Kutim dengan cara melengkapi data-data lembaga penyiaran yang salah satunya memperbarui visi dan misi. Visi dan misi diperbarui agar sejalan dengan program yang pemerintah jalankan saat ini. Kemudian sebagai media pemerintah, TV Kutim dan Dinas Kominfo hendaknya menyiarkan program yang berimbang yang tidak memprioritaskan kepentingan pemerintah saja.
2. Dinas Kominfo dan TV Kutim dapat lebih selektif dalam memilih karyawan yang bekerja dalam TV Kutim dengan cara merekrut orang-orang yang profesional di bidang penyiaran. Kepala UPTD juga diharapkan dapat mempertegas intruksi kerja sesuai dengan *job description* karyawannya sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan secara profesional.
3. Agar pelaksanaan manajemen dapat berjalan dengan baik, Dinas Kominfo dan TV Kutim harus mengetahui apa visi misi yang lembaga penyiaran.

Sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan terhadap setiap fungsi-fungsi manajemen maupun program yang disiarkan dapat dilakukan secara ketat oleh dinas kominfo maupun TV Kutim. Karena manajemen yang tidak baik akan menghasilkan program yang tidak baik pula. Program yang tidak berkualitas tentu akan menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat.
5. Evaluasi dapat dilakukan secara rutin seperti mengadakan pertemuan setiap minggu atau bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berlangsung sehingga dapat diketahui keberhasilan apa yang telah dicapai oleh TV Kutim maupun kesalahan atau kekurangan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya.
6. Diharapkan Dinas Kominfo bersama staff penyiaran TV Kutim dapat membangun komunikasi yang baik dalam mengelola media penyiaran TV Kutim. Dinas Kominfo dapat lebih memperhatikan kesejahteraan dan membina hubungan yang baik dengan para karyawan TV Kutim. Bukan hanya itu, Kepala UPT TV Kutim hendaknya juga dapat membangun komunikasi yang baik di internal TV Kutim yang tidak membedakan karyawan dan menjalin komunikasi secara adil dengan semua karyawannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran juga dibutuhkan orang-orang profesional yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu diharapkan TV Kutim secara rutin dapat melakukan pelatihan untuk menunjang keahlian karyawan seperti melakukan pelatihan produksi siaran televisi ataupun jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. 2004. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Akil, Anshar. 2009. *Standarisasi Manajemen Penyiaran: Mewujudkan Profesionalisme Radio&TV*. Sulsel: KPID Sulawesi Selatan
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Djatmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Junaedi, Fajar. 2014. *Manajemen Media Massa, Teori Aplikasi dan Riset*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta
- Marhaeni, Fajar. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana
- Morissan. 2011. *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana

- Suprpto, Tommy. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi. Yogyakarta: CAPS
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sudiby, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Terry, George, Leslie Rue. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Internet

- Data Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Provinsi Kalimantan Timur
<http://kpid.kaltimprov.go.id/files/DATA%20LEMBAGA%20penyiaran%20publik%20Lokal.pdf> (diakses 25 Februari 2017)
- Profil TV Kutim <https://tvkutim.wordpress.com/author/tvkutim/> (diakses 25 Februari 2017)
- Permasalahan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Daerah Sumatera Barat
<http://www.sumedangonline.com/lembaga-penyiaran-publik-lokal-dan-problematikanya/3561/2/> (diakses 25 Februari 2017)
- Permasalah TuguTV di Yogyakarta <http://etd.respository.ugm.ac.id> (diakses 25 Februari 2017)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/860.bpkp (diakses 25 Februari 2017)